

**TRAGEDI SAMPIT 2001
DAN IMBASNYA KE PALANGKA RAYA
(Dari Konflik ke (Re)konstruksi)¹**

Abdul Rachman Patji²

Abstract

This article discusses the 2001's ethnical conflict between Madures and groups of the Dayak people in Central Kalimantan. The discussion about the Palangka Raya case, but the conflict itself is the impact of Sampit's tragedy where the conflict firstly emerge. This article focuses on how the government's official of Palangka Raya together with other elements of population to manage the conflict and the Dayak efforts to reconstruct their social and ethnical traditions after the tragedy.

Pendahuluan

Kerusuhan sosial selalu merupakan awal dari dua hal ialah bencana sosial dan sesudahnya (re)konstruksi sosial. Jika yang pertama dapat berlangsung seketika, cepat dan dalam tempo yang singkat, maka yang kedua seringkali berlangsung setahap demi setahap, lambat dan bisa mengambil waktu bertahun-tahun.

Apabila dicermati secara mendalam, konflik etnis di Kalimantan Tengah antara orang Madura dengan warga masyarakat Dayak bukanlah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Puncak peristiwanya terjadi dalam sesaat, namun sesungguhnya benih-benihnya ternyata sudah berakumulasi selama bertahun-tahun. Konflik-konflik terdahulu yang melibatkan orang Dayak dan Madura yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas menyisakan residu konflik yang siap meledak sewaktu-waktu. Begitulah sebagian latar belakang tragedi Sampit yang kemudian meluas menjadi tragedi Kalimantan Tengah.

Kerusuhan sosial di Kalimantan Tengah merombak konstruksi etnisitas masyarakatnya. Sebelumnya masyarakat Kalteng terdiri atas berbagai etnis tanpa pembatasan. Karena tragedi itu beberapa kota (Sampit,

¹ Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilaksanakan pada bulan Mei s/d akhir Juni 2002 di Palangka Raya. Terima kasih peneliti ucapkan kepada semua informan, instansi, pihak-pihak yang telah berbagi informasi dan pengalaman yang sangat berharga.

² Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI).

Palangka Raya, Kuala Kapuas) sampai Juni 2002 tidak mempunyai penduduk dari etnis Madura. Tragedi tersebut disamping me(re)konstruksi tatanan pluralitas masyarakatnya, sebenarnya ia juga me(re)konstruksi pandangan terhadap posisi dan peranan masyarakat Dayak yang sebelumnya dikenal sebagai kelompok etnis yang ramah, suka berkawan, menjunjung tinggi solidaritas dan banyak lagi atribut lainnya yang mengarah kepada sifat yang menyukai keakraban, kedamaian dan ketenteraman. Akibat tragedi tersebut pandangan sebagian orang berubah dengan memosisikan orang Dayak sebagai warga suatu sukubangsa yang dapat pula beringas, suka membunuh, dan atribut lainnya yang berfokus kepada tuduhan kurang memiliki rasa prikemusiaan.

Pandangan suatu kelompok dalam melihat kelompok masyarakat lainnya memang senantiasa berubah seiring dinamika proses hubungan yang terjalin antar kelompok-kelompok yang ada. Kondisi demikian pada hakekatnya adalah juga konsekuensi logis dari masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu (re)konstruksi kekuasaan dalam konteks daerah yang otonom tidak bisa dilepaskan dari konsep “komunitas kami atau kita (*us*)” yang seringkali dibedakan, bahkan dipertentangkan, dengan “komunis mereka” (*others*). Begitu juga perbedaan antara mayoritas dan minoritas, superior dan inferior, dominasi dan subdominasi. Allan Bullock et.al. (1989) menulis bahwa (re)konstruksi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang bersifat logik (*logical (re)construction*) dan hipotetis (*hypothetical (re)construction*). Keduanya merupakan konsep-konsep pemikiran yang tidak mempunyai hubungan dengan realitas tetapi keduanya sangat berfaedah untuk mengikhtisarkan sejumlah rincian fakta-fakta atau membuat formulasi teori-teori yang menjelaskannya. Oleh karena itu pembicaraan mengenai konstruksi atau (re)konstruksi “*mood of the Dayak peoples*” pada hakekatnya tidak hanya mengenai suasana hati dari sukubangsa (*peoples*) Dayak itu sendiri, tetapi lebih berkaitan dengan sikap dan tingkah laku berjuta orang yang secara kolektif menyatakan diri sebagai warga Dayak.

Pada umumnya “komunitas kami atau kita” seringkali dianggap sebagai dasar pemahaman terhadap kebenaran. Cara pandang demikian, menurut Stanley J. Grenz (2001) sekurang-kurang menegaskan bahwa “apapun yang kita anggap benar dan cara kita mengatakan kebenaran itu sangat bergantung kepada komunitas kita. Tidak ada kebenaran mutlak, kebenaran itu tergantung kepada komunitas”. Bertolak dari kondisi seperti itu maka pembahasan dalam tulisan ini sebenarnya merupakan bagian dari proses (re)konstruksi komunitas etnis Dayak. Tragedi Sampit yang kemudian melebar ke Palangka Raya selain mereformulasi hubungan warga Dayak dengan warga sukubangsa Madura, juga me(re)konstruksi konsep etnisitas dari masyarakat Dayak sendiri.

Tragedi Sampit 2001

Tragedi Sampit adalah sebuah malapetaka, demikian dinyatakan oleh beberapa orang informan dalam kesempatan wawancara. Menurut mereka, peristiwa Sampit, Kotawaringin Timur, selain menyebabkan adanya korban ratusan nyawa manusia melayang, harta benda musnah juga terjadi pengungsian penduduk secara besar-besaran untuk menyelamatkan diri daripada menjadi korban amukan massa, banyak orang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang masa depannya suram karena pendidikannya terganggu dan banyak yang putus sekolah, keamanan tidak stabil, lingkungan sosial tidak kondusif, juga menyisakan tekanan psikologis yang mendalam di kalangan masyarakat. Seorang pemilik toko, Bapak HM, orang Banjar³ menyatakan "setiap kali mendengar ada warga / keluarga suku Madura ditemukan di tempat persembunyiannya, perasaan selalu membatin semoga tidak ada lagi pembunuhan, pembantaian". Seorang lainnya, Pak S, berasal dari Jawa,⁴ bekerja di sebuah usaha fotocopy di Palangka Raya menyatakan "... sejak peristiwa itu – menyaksikan orang-orang Dayak membawa kepala manusia menyusuri beberapa jalan protokol di Palangka Raya – saya selalu berdoa semoga tidak akan pernah melihat lagi peristiwa seperti itu sampai akhir hayat".

Kerusuhan sosial Sampit memang masih menyisakan banyak permasalahan dan pertanyaan. Ada asumsi yang menyatakan bahwa latar belakang peristiwa Sampit adalah karena orang-orang Dayak cemburu kepada orang Madura yang sukses dalam usaha ekonomi. Menanggapi asumsi ini seorang tokoh masyarakat Dayak, HC menyatakan bahwa memang harus diakui banyak orang Madura berhasil dalam kegiatan atau usaha ekonomi, tetapi bukan hal itu yang menjadi penyulut kerusuhan sosial Sampit 2001. Dikatakannya kalau sukses di bidang ekonomi orang Cina jauh melebihi orang Madura, tetapi mengapa mereka tidak dipermasalahkan oleh orang-orang Dayak. Sebenarnya latar belakang kerusuhan Sampit 2001 yang kemudian meluas ke beberapa kota / kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah adalah benturan budaya bukan kecemburuan sosial. Bapak HC⁵ lebih jauh menjelaskan bahwa warga

³ HM (55 tahun) kelahiran Kalimantan Selatan, tetapi sejak tahun 1968 sudah meninggalkan Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Tengah pernah tinggal di Kula Kapuas sebelum masuk Palangka Raya pada tahun 1974. Pada saat ini bekerja sebagai pedagang sepatu di sebuah pasar di Palangka Raya.

⁴ Pak S sudah 20 tahun merantau di Kalimantan. Sebelum di Palangka Raya beliau pernah tinggal di Banjarmasin, kemudian ke Buntok Kalimantan Tengah. Di Buntok berjumpa dengan seorang gadis yang kemudian menjadi isterinya. Isterinya juga keturunan Jawa tetapi kelahiran Kalimantan, kedua orang tuanya berasal dari Jombang.

⁵ Bapak HC, lahir 1937, pensiunan dan warga masyarakat Dayak yang bertempat tinggal di Sampit. Beliau adalah salah satu dari beberapa tokoh masyarakat Dayak yang terlibat dalam usaha rekonsiliasi dan upaya perdamaian akibat terjadinya kerusuhan Sampit 2001. Beliau pernah menghadiri (sebagai peserta) pertemuan yang membicarakan upaya perdamaian di Jakarta dan menjadi anggota panitia pendirian "Tugu Peringatan" peristiwa Sampit yang direncanakan akan diresmikan

Madura tidak mau mengerti budaya masyarakat Dayak. Mereka tidak menghayati dan mempraktekkan budaya "dimana langit dijunjung disitu bumi dipijak" – maksudnya tidak menghargai kebudayaan, adat istiadat masyarakat lokal, yang dalam hal ini adalah kebudayaan masyarakat Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memang merupakan wilayah konsentrasi terbanyak warga keturunan Madura di Kalimantan Tengah. Sebelum kerusuhan diperkirakan ada sekitar 75 ribu jiwa penduduk Madura di daerah itu. Di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kotim mereka mempunyai 4 orang wakil (1 PAN, 1 PPP dan 2 PKB). Mungkin karena besar jumlah warganya, sehingga merasa berpengaruh dan juga "menguasai" Sampit, ibukota Kotawaringin Timur. Begitulah ketika melakukan pawai keliling kota Sampit, 18-19 Pebruari 2002, mereka menunjukkan kekuatannya, dengan membawa senjata tajam (clurit) dan membawa spanduk yang bertuliskan "Selamat Datang di Sampang II". Jadi orang Madura mendeklarasikan Sampit atau Kotawaringin Timur sebagai Sampang II (Sampang I tentunya yang ada di Pulau Madura). Mereka pun melakukan pembakaran dan pembunuhan terhadap warga masyarakat Dayak. Pembunuhan ini, menurut beberapa informan, sebagai pembalasan terhadap perlakuan yang sama yang dilakukan oleh warga Dayak terhadap warga Madura sebelumnya.

Sebenarnya konflik antar kedua kelompok masyarakat tersebut serta berakibat adanya korban meninggal sudah seringkali terjadi. Rupanya terhadap konflik-konflik seperti itu dan beberapa lagi tindakan yang sejenis terjadi jauh sebelum tragedi Sampit 2001, pihak aparat keamanan dan penegak hukum tidak menerapkan tindakan hukum yang tegas. Bermacam-macam kendala dan masalah untuk melakukan solusi hukum yang terbaik dan adil, mulai dari alasan jumlah personil yang terbatas, peralatan yang tidak memadai, juga ada sistem pemihakan dalam menangani persoalan konflik sosial dan sampai kepada indikasi penyuaipan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang terlibat konflik merasakan adanya ketidakadilan.⁶ Bagi masyarakat Dayak, menghadapi atau dihadapkan dengan masalah-masalah seperti itu, pada akhirnya dengan sangat terpaksa mengambil cara solusi yang paling tradisional, yaitu dengan mengadakan perlawanan. Tragedi Sampit 2001 itu pun muncul dengan sangat transparan ke permukaan.

oleh Wakil Presiden pada Minggu 16 Agustus 2002. Rencana peresmian batal karena ternyata pendirian tugu itu sendiri menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Dayak.

⁶ Sebelum meletusnya peristiwa Sampit (18 Pebruari 2001) telah beberapa kali masyarakat Dayak Kotim memberikan laporan kepada Polres Sampit tentang adanya warga Madura memiliki, menyimpan bom dan senjata organik, namun aparat keamanan tidak mengambil tindakan apapun (sumber: beberapa informan penelitian).

Tabel 1
Kerusuhan Sosial Antar Etnis di Kalimantan Tengah 1997-2001

Tahun	Lokasi / Frekuensi	Jumlah Pengungsian	Jumlah Terlantar
1997	-	-	127 orang
1998	Kotim / 2 kali	180 orang	177 orang
1999	Tb. Samba / 1 kali	135 orang	214 orang
2000	Kereng Pangi / 5 kali	401 orang	98 orang
2001 (sampai 30/4/01)	Kalteng / 4 kali	97,732 orang	18 orang

Sumber: Penanggulangan Bencana dan Pengungsi, Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kesejahteraan Sosial.

Dari Sampit ke Palangka Raya⁷

Imbas tragedi Sampit sampai ke Palangka Raya mulai terjadi sejak hari meletusnya tragedi itu, yaitu pada tanggal 18 Pebruari 2001. Ketika itu sudah mulai adanya gelombang pengungsian warga dari berbagai etnis ke kota Palangka Raya. Juga ibukota Propinsi Kalimantan Tengah ini mulai dilanda berbagai isu yang sangat berpengaruh terhadap opini masyarakat umum, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Aktivitas masyarakat mulai terganggu, misalnya esok harinya di pasar-pasar sebagian pedagang tidak berani membuka toko, kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah berhenti sementara, kantor-kantor pemerintah sepi karena sebagian pegawai negeri sipil tidak ke kantor, juga transportasi umum berkurang.

Upaya mengantisipasi dan menyikapi pengaruh yang lebih luas dari Tragedi Sampit dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Atas dasar undangan yang dikirimkan tanggal 19 Pebruari 2001 (pagi), dan sore harinya mulai jam 15.00 pada hari yang sama, Pemerintah Kota Palangka Raya mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh paguyuban dari berbagai etnis se Kota Palangka Raya.⁸ Tujuan pertemuan, menurut pihak Pemkot Palangka Raya, untuk

⁷ Selain dari informan penelitian sebagai sumber data primer, informasi-informasi dalam bagian ini juga dikedepankan dengan merujuk kepada 2 (dua) buku (laporan) yang disusun pihak Pemerintah Kota Palangkaraya, yaitu (1) *Langkah Langkah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Palangka Raya Terhadap Kejadian di Kota Palangka Raya*, dan (2) *Laporan Perkembangan Terakhir Pasca Kerusuhan di Kota Palangka Raya (Periode s/d 31 Maret 2001)*.

⁸ Pertemuan tersebut dipimpin oleh Walikota Palangka Raya, yang diikuti oleh unsur Muspida Kota Palangka Raya, Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, DAN YONIF 831 Antang, Camat Pahandut dan Camat Bukit Batu, semua Lurah dalam Kota Palangka Raya, serta para ketua organisasi paguyuban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh LSM, tokoh pemuda

menyampaikan informasi yang sebenarnya tentang kronologis kejadian (di Sampit Kotawaringin Timur) dan berdialog langsung untuk mencari solusi terbaik agar di wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya tidak terjadi hal-hal serupa.

Dalam kesempatan itu berbicara, antara lain pihak Kapolresta Palangka Raya menyampaikan kejadian kerusuhan etnis di Kotawaringin Timur dan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan untuk mengendalikan situasi, dan menyarankan kepada masyarakat Kota Palangka Raya untuk tetap tenang karena aparat sudah melakukan pemantauan di setiap kegiatan masyarakat. Pihak Dandim 1016 Palangka Raya menginformasikan kepada semua peserta tentang tugas dan tanggung jawab TNI dalam masalah keamanan untuk mendukung pihak Kepolisian dalam mengantisipasi isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat luas dan menghimbau untuk waspada terhadap provokator yang datang dari luar Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan itu, Ketua LMMDD-KT (Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah), Prof H. KMA M. Usop MA, menyarankan agar masyarakat dapat mengendalikan diri terhadap isu-isu minor yang berkembang, tidak menjadi “pengipas” masalah serta mengamalkan budaya dimana bumi di pijak disitu langit dijunjung.

Dalam pertemuan itu, forum dialog yang digelar kemudian dipandu oleh 2 (dua) tokoh pemuda masing-masing dari suku Dayak Drs. Yansen Binti, MBA dan dari suku Madura Abdul Hadi, BR, SH. Tujuan dialog ialah mencari solusi bagaimana melakukan antisipasi terhadap kejadian Sampit tersebut agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya serta bagaimana menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang sebagai imbas dari kejadian Sampit, agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan akurat sehingga tidak terjadi keresahan di kalangan masyarakat Palangka Raya khususnya.

Dalam forum dialog telah berbicara sebanyak 19 (sembilan belas) tokoh dengan menyampaikan pula sejumlah saran-sarannya. Tokoh-tokoh itu selain sebagai pribadi yang ikut prihatin atas tragedi Sampit, mereka juga mewakili beberapa unsur atau organisasi yang ada di Palangka Raya, antara lain DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Palangka Raya, LMMDD-KT (Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah), KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan), Masyarakat Dayak, Warga Kawanua (Manado), Angkatan 45, IKAMA (Ikatan Keluarga Madura), Demang Tengkilang, organisasi DUSMALA (Dusun Manyan dan Lawangan), Universitas PGRI, MPR RI, Organda Tk I Kaltim, Warga Rungan Manuhing, dan lain-lain.

dari KNPI dan mahasiswa dari berbagai suku / etnis yang ada di Palangka Raya, berjumlah sekitar tiga ratus orang.

Beberapa hal yang dikemukakan dan diusulkan ialah (1) agar siskamling RT/RW ditingkatkan, bentuk pengamanan swakarsa (2) agar aparat keamanan menindak tegas para perusuh tanpa pandang bulu dari etnis / suku mana saja, bertindak persuasif dan tidak memihak (3) tegakkan supremasi hukum, (4) bentuk forum komunikasi antar etnis / suku di Palangka Raya untuk perdamaian dan mempermudah penyampaian informasi, (5) menyikapi agar kasus di Sampit dan kasus konflik etnis karena minuman keras di Kereng Pangi tidak terjadi di Palangka Raya, (6) masing-masing etnis / suku membina warganya dan menghimbau warganya di Sampit agar menghentikan kerusuhan, (7) menangkal hal-hal yang dapat merusak kerukunan masyarakat di lapisan bawah, (8) mengenali warga di lingkungan masing-masing, warga masuk dari luar daerah diadakan razia / sweeping KTP dan senjata tajam (9) kendalikan minuman keras di Palangka Raya, (10) serahkan / percayakan penanganan kasus kepada pengamanan yang dibantu TNI dan masyarakat, (11) agar aparat menyebarkan intelijen di lingkungan masyarakat, (12) jangan terima isu-isu yang tidak jelas sumber dan kebenarannya, (13) pekerja batu di Tengkilang agar diungsikan sementara, (14) ambil senjata tajam dari kedua belah pihak, (15) warga yang datang dari Sampit agar dikunjungi untuk menenangkannya, (16) penyelesaian jangan hanya di tingkat elit saja, (17) hilangkan rasa dendam, (18) selesaikan masalah melalui forum dialog, (19) pers sangat mempengaruhi keadaan, (20) suku-suku lain agar aktif mencari solusi yang terbaik, (21) bentuk forum lintas suku di Palangka Raya, (22) IKAMA sulit mengenal warganya yang baru datang karena tidak melapor diri, (23) usut tuntas kasus yang terjadi dan nyatakan kepada masyarakat secara transparan, (24) laksanakan budaya *betang* untuk semua suku di Palangka Raya, (25) di Sampit terindikasi ada keberpihakan dari aparat, (26) usaha optimal jangan dilakukan hanya ketika konflik, (27) kerusuhan Sampit terjadi karena kesenjangan sosial, (28) agar dipahami dulu peristiwa Sampit secara benar dan jelas, (29) persoalan Sampit agar diblokir, (30) tenaga kerja yang masuk Kalteng masih banyak tidak memiliki identitas yang jelas, (31) tenaga kerja melalui cukong agar disepakati dulu pemerintah daerah, (32) dalam forum yang akan dibentuk agar sedapatnya ada wakil-wakil dari kerukunan warga yang ada di Palangka Raya, seperti jalur sungai yang ada – Barito, Kapuas, Kahayan, Mentaya dan Rungan Manuhing, (33) berpikir jernih dalam menyikapi masalah yang terjadi, (34) hentikan semua hujatan kepada TNI / POLRI.

Dari pertemuan tersebut disepakati tiga hal, yaitu (1) masing-masing tokoh etnis yang ada di Palangka Raya agar menghimbau warganya masing-masing yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menghentikan pertikaian yang terjadi; (2) membentuk Forum Komunikasi Antar Suku / Etnis, yang ada di kota Palangka Raya, untuk memudahkan komunikasi antar warga; (3) untuk membentuk Forum tersebut telah terbentuk Tim Kecil sebagai Formatur / Tim Perumus untuk menyusun Kepengurusan yang diberi waktu selama 3 (tiga) hari harus sudah selesai.

Dilihat dari segi waktu pertemuan, yaitu pada sore hari tanggal 19 Pebruari 2001, dan berdasarkan undangan tanggal 19 Pebruari 2001 (pagi hari) sebagai respon terhadap kerusuhan Sampit tanggal 18 Pebruari 2001, dapat dikatakan bahwa upaya Pemerintah Kota Palangka Raya cq Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mengantisipasi peristiwa Sampit dan dampaknya sebenarnya termasuk cepat. Kemampuannya mengumpulkan sekitar 300 peserta dialog dari berbagai unsur masyarakat etnis, lembaga dan organisasi serta mahasiswa, maupun upaya menciptakan semangat dan memberikan suasana kebebasan berbicara dan berpendapat dalam forum sangat demokratis. Hasil-hasil forum dialog, seperti dikedepankan oleh 19 orang pembicara dan dibentuknya Forum Komunikasi Antar Suku / Etnis Kota Palangka Raya, semestinya dapat menjadi pangkal tolak untuk menangkal meluasnya dampak kerusuhan Sampit di Palangka Raya. Namun, ternyata tidak demikian.

Masalahnya perkembangan peristiwa Sampit membawa pengaruh yang sangat besar. Berita dan informasi yang menyebar di masyarakat bahwa dalam 3 (tiga) hari saja (22 Februari 2001) jumlah korban kerusuhan (meninggal) sudah 57 orang, ada yang menyatakan sudah 110 orang dan pada sehari berikutnya (23 Februari 2001) sudah mencapai 200 orang. Diantara korban yang meninggal puluhan dibunuh secara sadis. Sementara itu jumlah pengungsi sudah lebih 250.000 orang dan Sampit serta daerah Kotawaringin Timur lainnya sudah menjadi wilayah pembantaian. Berita dan informasi menyedihkan seperti itu menjadi salah satu penyebab yang mempercepat gerak dan perubahan masyarakat di Palangka Raya kepada kondisi konflik antar kelompok masyarakat Dayak dan warga Madura.

Adanya berita bahwa pihak keamanan di Sampit menahan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan di kota tersebut, termasuk warga masyarakat Dayak. Karena jumlahnya besar sehingga tidak memungkinkan semuanya ditahan di Mapolres Sampit. Sebanyak 38 orang, semuanya warga Dayak dipindahkan ke tahanan Mapolda Kalimantan Tengah. Penahanan itulah yang menimbulkan ketidakpuasan bagi warga masyarakat Dayak di Palangka Raya. Pada tanggal 21 Pebruari 2001, warga masyarakat Dayak di Palangka Raya mengadakan unjuk rasa ke DPRD Propinsi Kalimantan Timur dan Kapolda Kalteng (untuk membebaskan tahanan) dengan tidak lupa mengajukan beberapa permintaan, tuntutan dan himbauan, sebagai berikut:

- 1) Keadilan dari aparat keamanan agar bersikap tidak memihak.
- 2) Pembebasan, penangguhan penahanan warga masyarakat Dayak (38 orang) yang diduga terlibat dalam kerusuhan Kota Sampit dan ditahan di Mapolda Kalimantan Tengah.
- 3) Kapolri mengganti Pejabat Kapolda Kalimantan Tengah.

- 4) Bupati Kotawaringin Timur supaya bertanggungjawab penuh menyelesaikan secara adil dan berimbang kerusuhan di Kota Sampit.
- 5) Kepada warga Madura yang tidak dapat menyesuaikan diri agar secara sukarela meninggalkan wilayah Kalimantan Tengah.

Sejak tanggal 21 Pebruari 2001 itu, keadaan dan suasana Kota Palangka Raya semakin mencekam, apalagi berbagai macam isu yang disebarakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bertambah banyak. Sementara itu, tanpa penekanan dan atas kesadaran sendiri beberapa warga Madura Kota Palangka Raya melakukan pengungsian melalui Banjarmasin / Kalimantan Selatan dengan pertimbangan demi keamanan bersama. Namun, bagi mereka yang belum mengungsi bersembunyi di sekitar Kota Palangka Raya.

Isu akan meluasnya konflik dari Sampit ke Palangka Raya menjadi kenyataan pada tanggal 24 dan 25 Pebruari 2001. Pada hari-hari tersebut, aksi solidaritas masyarakat Dayak melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah / toko / kios dan kendaraan milik warga etnis Madura. Para peserta aksi itu juga melakukan *sweeping* (pembersihan) di beberapa tempat yang mereka curigai sebagai persembunyian warga etnis Madura. Aksi-aksi tersebut menimbulkan korban jiwa 7 (tujuh) orang yang ditemukan mayatnya pada tanggal 27 Pebruari 2002, terdiri atas 2 orang wanita dan 5 orang pria; pada hari itu juga dimakamkan di pemakaman Muslimin Jl. Cilik Riwut Km. 2 Palangka Raya.

Kejadian pada tanggal 25 Pebruari 2002, berawal ketika ada penjambretan di Pasar Besar yang menyebabkan keributan di sekitar pasar. Pada hari itu juga aparat keamanan menemukan sejumlah bom di Jalan Dr Murjani (Panarung Bawah).⁹ Akibat penemuan bom itu memicu gerakan amuk massa warga lokal dengan membawa spanduk bertuliskan "Usir Madura" dan massa sudah tidak terkendali lagi dan langsung merusak Komplek IKAMA (Ikatan Keluarga Madura) dan terus menjalar ke berbagai sudut kota. Gerakan amuk massa tersebut mengakibatkan kerusakan harta benda.

⁹ Informasi Walikota Palangka Raya menyebutkan bahwa tanggal 25 Pebruari 2001 ditemukan 2 (dua) bom di sekitar Jalan Dr. Murjani di belakang Service Teknik Ban Palangka Raya; besoknya pada tanggal 26 Pebruari 2001, jam 24.00 (WIB) meledak 2 (dua) bom di sekitar tempat yang sama; tanggal 1 Maret 2001, 9 buah bom di Jalan Dr. Mujani, eks Toko Karya Agung Palangka Raya dan 23 bom lagi ditemukan di Komplek IKAMA Palangka Raya. Sampai tanggal 1 Maret 2001 di sekitar Palangka Raya telah terjadi 2 (dua) kali teror bom yaitu di gedung Batang Garing dan di Rumah Sakit DR Doris Silvanus Palangka Raya. Jumlah bom yang ditemukan pihak Kepolisian sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah.

Beberapa informan penelitian menyatakan bahwa sejak tanggal 25 Pebruari 2001 sampai kurang lebih sebulan kemudian, keadaan Kota Palangka Raya seakan-akan dalam siaga “perang”, disetiap lorong, jalan, kampung, RT/RW, setiap hari dan malamnya terdapat kelompok-kelompok penduduk yang mengadakan siskamling. Kegiatan itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mengarah kepada timbulnya kerusuhan. Sampai tanggal 31 Maret 2001, berdasarkan laporan Pemerintah Kota Palangka Raya, korban kerusuhan sebanyak 7 (tujuh) orang, belum termasuk ditemukannya kepala manusia (tanpa identitas) di Betang Mandala Palangka Raya, pada tanggal 25 Maret 2001 dan ditemukannya mayat tanpa kepala di Jalan Adonis Samad, Panarung, pada tanggal 28 Maret 2001.¹⁰

Imbas kerusuhan Sampit di Palangka Raya, sampai penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2002, masih terasa dampak dan pengaruhnya. Dalam pengertian, menurut para informan, konflik masih menyisakan keadaan kehidupan ekonomi kota Palangka Raya yang belum benar-benar pulih setelah kepergian warga etnis Madura dari kota ini. Masalahnya ialah beberapa jenis pekerjaan yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh warga Madura, seperti menarik gerobak barang di pasar, menarik becak yang dapat memperlancar perjalanan seseorang dari/ke suatu tempat dan tujuan, mengumpulkan barang-barang bekas, bahkan menjadi sopir angkutan kota belum sepenuhnya dilakukan oleh warga dari kelompok etnis lainnya. Dari berbagai informasi juga menyebutkan bahwa tingkat tamu hotel dan penginapan mengalami penurunan, pelanggan dan tamu rumah makan dan restoran berkurang, demikian pula di beberapa pertokoan dan supermarket tingkat keramaiannya tidak seperti ketika masa sebelum kerusuhan terjadi. Kurangnya jumlah taksi yang beroperasi dari Bandara Tjilik Riwut ke wilayah Kota Palangka Raya, juga merupakan salah satu jenis dampak dari kerusuhan. Seorang sopir angkutan kota menyatakan bahwa hengkangnya orang Madura berdampak juga kepada perekonomian di Palangka Raya, buktinya jumlah orang yang naik angkot (angkutan kota) berkurang sehingga berakibat berkurangnya pula penghasilan sopir angkot.

¹⁰ Rekapitulasi kerugian kerusuhan antar etnis Dayak dan Madura di Palangka Raya adalah sebagai berikut. (1) Bangunan yang dibakar / dirusak 1.012 buah, di Kecamatan Pahandut 935 buah dan di Kecamatan Bukit Batu 87 buah. (2) Kendaraan yang dirusak sebanyak 215 buah, terdiri dari bus/truck 5 buah, roda empat 7 buah, roda dua 2 buah dan becak 201 buah. (3) Kerusakan pos polisi 1 buah, pos polantas 7 buah, patung polantas 1 buah. (4) Korban jiwa 14 orang, pendatang 9 orang, warga lokal 4 orang, anggota POLRI 1 orang. (5) Luka-luka 8 orang, warga lokal 5 orang, POLRI 3 orang. (6) Penemuan bom atau bahan peledak 152 buah, bom rakitan 98 buah, bom molotov 13 buah, bom law explosive 41 buah. (7) Penemuan amunisi (CODE PIN No.38) 32 butir. (8) Data pengungsi – masyarakat lokal lokal 9300 orang, masyarakat etnis Madura 876 orang.

Kondisi Pasca Kerusuhan

Dampak kerusuhan Sampit, sampai penelitian ini dilakukan pada bulan Mei s/d akhir Juni 2002, berarti sudah hampir satu setengah tahun berlalu sejak meletusnya pada tanggal 18 Pebruari 2001, menunjukkan kondisi yang sebenarnya untuk seluruh wilayah Kalimantan Tengah, juga di Palangka Raya belum bisa disebut sudah kondusif secara total, terutama untuk warga Madura. Dikatakan demikian karena beberapa warga Madura yang berhasil ditemukan oleh warga masyarakat setempat, walaupun telah “menyembunyikan” identitasnya tetap saja diminta kembali untuk keluar dari wilayah Kalimantan Tengah. Di Palangka Raya beberapa kasus terjadi dan disini akan dikedepankan 2 (dua) kasus.

Kasus I.¹¹

Kejadiannya pada tanggal 6 Juni 2002 yang melibatkan seorang bernama Boniwar (39). Boniwar dan Madi (temannya, orang Banjar) datang di Palangka Raya dari Sebangau (5 Juni 2002) dengan maksud menagih utang kerja kayu pada bosnya, Cuming. Mereka menginap di Hotel Halmahera. Namun, pada pagi hari tanggal 6 Juni, ketika dia lagi berada di atas angkot (angkutan Kota) di Jalan Darmosugondo, tiba-tiba angkot yang ditumpangnya dihentikan kawanan pemuda pasar pimpinan Dhadhiet dan Anjang. Begitu angkot berhenti, Boniwar diminta turun dan kejadian itu menarik perhatian warga pasar. Beruntung petugas dan Dhadhiet cs cekatan dan langsung menghubungi Kecamatan Pahandut. Pada saat itu juga Bonimar dibawa ke kantor kecamatan di Jalan Diponegoro Palangka Raya.

Boniwar sangat fasih berbahasa Dayak sehingga sulit diketahui identitasnya baik oleh Dhadhiet cs maupun pihak Hotel Halmahera. Dia sebenarnya adalah asli kelahiran Mandomai (Kalimantan Tengah). Bapaknya Banjar, ibunya keturunan Madura yang lahir di Mandomai juga. Boniwar dan temannya Madi sudah dua bulan bekerja di Sebangau. Selama di sana, tidak ada seorang pun yang mengusiknya. Dia masuk Sebangau lewat Garong.

Camat Pahandut menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak bermaksud mengusir Boniwar. Dibawa ke kantor kecamatan maksudnya untuk dilindungi dan diamankan karena, meskipun Palangka Raya sudah relatif kondusif, tapi karena aturan mainnya (izin masuknya warga Madura ke Palangka Raya) belum ada, maka diminta untuk bersabar atau sebaiknya jangan ke Palangka Raya dulu. “Itu demi keamanan semuanya” Kepala Kesbang

¹¹ Selain wawancara dengan Camat Kecamatan Pahandut dan Kepala Kesbang Linmas Kota Palangka Raya, rujukan lainnya *Kalteng Pos*, 7 Juni 2002.

Linmas Kota Palangka Raya, menambahkan. Setelah beberapa saat di kantor Kecamatan Pahandut, Boniwar diantarkan sampai keluar Kalampangan dengan menggunakan mobil Toyota Kijang. Sebelumnya Camat memberi sugu. Boniwar menyatakan mau langsung ke Binuang, Kalimantan Selatan, tempat tinggalnya memang di sana.

Kasus Boniwar tersebut menarik karena sebenarnya apabila dilihat dari segi tujuannya ke Palangka Raya, yaitu untuk menagih upah kerja, berarti hanya tinggal sementara, dalam beberapa hari saja. Namun demikian, ternyata tetap juga menjadi “masalah” bagi masyarakat dan pemerintah di Palangka Raya. Keadaan itu menandakan bahwa, bagi warga keturunan Madura, kota Palangka Raya sampai saat itu belum juga kondusif bagi mereka. Pihak pemerintah kota dan aparat keamanan pun belum dapat memberikan jaminan keamanan, sehingga jalan yang ditempuh ialah mengantar kembali mereka yang ditemukan ke luar dari Palangka Raya.

Kasus 2.¹²

Kejadian pada tanggal 9 Juni 2002 di Pasar Besar Palangka Raya, melibatkan seorang perempuan (ibu) (36 tahun) bernama Ramlah yang terindikasi warga etnis Madura. Ditemukan ketika sedang berbelanja di sebuah warung. Ramlah terpaksa diamankan di sebuah rumah warga di dekat Toko Sumber Logam di Jalan Sumatera. Ramlah yang bicaranya sangat terpengaruh logat Madura ditemukan oleh Dhadhiet, pemuda pasar, yang kemudian menyerahkannya kepada Camat Pahandut, ketika itu didampingi oleh Kepala Kesbang Linmas Kota Palangka Raya, yang menjemputnya. Ramlah kemudian dibawa ke kantor Kecamatan Pahandut, Jalan Diponegoro, Palangka Raya.

Dalam pengakuannya ke Pak Camat, Ramlah menyatakan sudah lebih (5) lima bulan berada di Palangka Raya. Kepada Dhadhiet dia menyatakan 3 (tiga) bulan. Saat kerusuhan pecah, dia memang sempat mengungsi ke Kandangan Kalimantan Selatan, tempat kelahirannya. Ramlah berayahkan orang Jember berdarah Madura, sedangkan ibunya orang Banjar Kandangan. Suaminya bernama Tony, orang Dayak asli bekerja di Kapuas. Ketika itu, Ramlah sendiri bekerja sebagai buruh pengupas bawang di Pasar Besar dengan gaji sebesar Rp7.500 per hari.

Sekembalinya dari pengungsian di Kandangan, Kalimantan Selatan, di Palangka Raya Ramlah dan suaminya serta 2 orang

¹² Wawancara dengan Camat Kecamatan Pahandut dan Kepala Kesbang Linmas Kota Palangka Raya, serta rujukan lainnya, *Kalteng Pos*, Senin 10 Juni 2002, *Posko Kalteng*, Senin 10 Juni 2002, dan *Radar Banjar*, Selasa 11 Juni 2002.

anaknya, pertama-tama tinggal di Jalan G. Obos. Dia kemudian pindah ke Jalan Murjani, Gang Kurnia, RT.04 RW.VIII (rumah salah seorang keluarganya) karena lebih dekat ke Pasar Besar tempatnya bekerja. Kedua orang tuanya dimakamkan di Pekuburan Muslim Km 2,5 Jalan Cilik Riwut. Ibu dua anak ini mengaku tidak tahu harus bekerja apa dalam pengungsianya di Kalimantan Selatan menyebabkan ia kembali ke Palangka Raya yang dianggapnya tanah tempat menanam jutaan harapan. Sejak kecil dia sudah di Palangka Raya, jauh sebelum jalan-jalan di lingkungan Pasar Besar diaspal.

Tentang kerusuhan 2001, Ramlah yang tidak bisa menulis dan membaca itu menyatakan bahwa kerusuhan itu membuatnya kehilangan segalanya merupakan musibah yang tak patut ia sesali. Dia hanya salah satu dari sekian ribu warga yang terpaksa kenah “getah” (akibat) dari “cempedak” yang dimakan (perlakuan) orang lain. Dia tidak menaruh dendam meskipun rumah dan sedikit harta yang susah payah dikumpulkannya tandas tak berbekas. Rumahnya di Jalan Kalimantan (Palangka Raya), tapi kini tinggal hanya puing-puing dan arang. Rumah berikut tanahnya dibeli dari usahanya, sebelum kerusuhan, bekerja sebagai pemulung yang mengumpulkan kardus dan plastik bekas. Menurutnya, penghasilan menjadi pemulung jauh lebih besar jika dibandingkan dengan menjadi buruh kupas bawang. Sehari, penjualan kardus dan plastik bekas yang dikumpulkannya bisa mencapai Rp30 ribu. Dari uang itulah, ia bersama suaminya berhasil mengumpulkan sedikit demi sedikit dan akhirnya dapat membeli tanah dan rumahnya.

Dengan alasan menyelamatkan jiwa Ramlah dan semuanya, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta kondisi psikologis sebagian masyarakat Palangka Raya belum bisa menerima Madura, Perda (Peraturan Daerah) reevakuasi etnis Madura eks konflik Sampit belum rampung, maka Ramlah sekeluarga akan segera dipulangkan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kasus 2 ini menunjukkan pengalaman seorang perempuan (ibu) pengungsi korban konflik yang berusaha kembali ke kota tempat tinggalnya, Palangka Raya. Sebenarnya dia sudah berhasil tinggal beberapa bulan dan, bahkan, sudah kembali bekerja, namun keberadaannya ternyata tercium juga oleh warga masyarakat Dayak. Dilihat dari sisi keluarga, dimana Ramlah sudah bersuamikan seorang laki-laki asli Dayak, ternyata juga belum bisa menjadi dasar yang kuat baginya agar bisa diakui oleh yang lain untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai keluarga masyarakat Dayak. Sebenarnya bagaimana membangun identitas etnis (dalam kaitan dengan penelitian ini “Dayak”), bagi keluarga yang jelas-jelas sudah campuran Dayak sekalipun, tampaknya suatu masalah yang sungguh rumit.

Untuk mendapatkan pengakuan itu mungkin sama sulitnya dengan keinginan pengungsi Madura korban konflik untuk kembali lagi menjadi warga Kalimantan Tengah. Kondisi demikian itu ada hubungannya dengan (re)konstruksi etnis Dayak yang akan dibahas selanjutnya.

(Re)konstruksi Etnisitas

Masa-masa pasca kerusuhan, bagi masyarakat Dayak sendiri, bukanlah masa yang sarat dengan kemudahan untuk menata kembali kehidupan sosial mereka. Selain kerusuhan itu membawa dampak sosial budaya, ekonomi dan politik, juga dampak psikologis yang sangat dalam. Akibat kerusuhan itu, mereka berhadapan dengan bermacam-macam tudingan dan tantangan yang cenderung menilai negatif dan memojokkan posisi mereka, tidak hanya berskala lokal, nasional bahkan juga internasional.¹³ Sementara itu upaya pemulihan kembali (*recovery*) keadaan adalah suatu keharusan, bukan saja sebagai respon terhadap berbagai tudingan dan tantangan yang muncul dari luar, tetapi juga merupakan tuntutan dari dalam (*internal pressure*) sebagai masyarakat yang beradab dan berbudaya.

Berbagai kegiatan yang mempunyai tujuan penataan kembali kehidupan sosial budaya mereka, khususnya yang berhubungan dengan (re)konstruksi etnisitas Dayak dilakukan. Pertama-tama digelar upacara ritual yang disebut “Mangantung Manaheta, Manguat Sahur Parapah” di Balai Kaharingan, Palangka Raya, pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2002. Upacara adat itu dipimpin oleh Damang Kepala Adat Sinyal Penyang (Damang Kecamatan Pahandut dan Koordinator Damang se Kalimantan Tengah). Upacara mempunyai tujuan untuk memohon keselamatan dan segera berakhirnya bencana seperti konflik berdarah yang terjadi di daerah-daerah Kalimantan Tengah. Tujuannya yang lebih umum ialah untuk menjaga wilayah dan masyarakat Kalimantan Tengah serta menghentikan konflik yang merugikan semua pihak dan bahkan mendiskreditkan citra masyarakat Dayak di dunia internasional. Upacara adat ritual itu juga adalah sebagai upaya konsiliasi secara spiritual dan supernatural yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat Kalimantan Tengah, termasuk didalamnya penjagaan terhadap preman-preman yang berdatangan di Kalimantan Tengah dengan maksud meresahkan masyarakat dengan cara hidup yang menghalalkan segala cara didalam segala lapisan dan tingkatan dalam masyarakat.¹⁴

¹³ Lihat pemberitaan berbagai publikasi tentang Peristiwa Sampit, dimana sebagian menyebutnya sebagai “pembantaian manusia”, “kebrutalan dan kebiadaban”, “tragedi kemanusiaan” dan lain sebagainya.

¹⁴ Sumber: Wawancara dengan Bapak Sinyal Penyang, Kepala Adat Pahandut, dan *Republika*, 19 Maret 2001.

Kegiatan lain di tingkat nasional ialah Musyawarah Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan (MDAB-BK) yang diadakan di Nam Centre, Jakarta, 22-24 Maret 2002. Pada kesempatan ini bertemu wakil-wakil kelompok yang terlibat konflik dan mereka yang peduli terhadap masalah-masalah konflik sosial. Selain dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan empat gubernur dari Kalimantan serta Jawa Timur, juga wakil-wakil yang hadir meliputi 4 (empat) propinsi di Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) serta dari Jawa Timur. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang pada intinya selain berorientasi untuk mengungkapkan akar masalah konflik, juga membuat prinsip dasar penyelesaian masalah-masalah konflik.¹⁵ Bagi pemimpin dan tokoh masyarakat Dayak, keterlibatan dalam musyawarah tersebut dan persetujuan terhadap semua keputusan yang dihasilkan sangat bermanfaat untuk membangun kembali citra “etnisitas” masyarakatnya.

Musyawarah damai itu juga telah menghasilkan rumusan-rumusan yang mengarah kepada kesamaan persepsi, kesamaan tujuan dan kesamaan cara bertindak dalam menangani masalah-masalah konflik. Kesamaan persepsi dibangun dari kesamaan cara pandang terhadap masalah yang terjadi dan yang sedang dihadapi, sehinggaantisipasi bisa dilakukan yaitu:

- 1) Bahwa kejadian di Bumi Kalimantan ini adalah musibah, yang harus kita terima dengan tawakal dan ikhlas, serta kita dapat memetik hikmah dari kejadian tersebut, sambil melakukan mawas diri agar kejadian ini adalah yang terakhir dan tidak akan terulang lagi.
- 2) Bahwa semua peserta bertekad untuk menciptakan suasana yang kondusif dan damai sehingga seluruh program rekonsiliasi dan rehabilitasi dapat terlaksana dengan baik.

¹⁵ Musyawarah itu telah mengidentifikasi akar masalah yang mendasar dari konflik yang terjadi sebagai berikut: (1) kebijakan pemerintah yang kurang tepat di masa lalu, (2) proses pembinaan dan pemberdayaan manusia yang kurang berhasil di masa lalu, (3) benturan budaya, (4) kemiskinan, (5) keamanan yang tidak kondusif, (7) ketidak-pastian dalam penegakan hukum. Untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah konflik kesamaan prinsip dasar yang digunakan adalah (1) menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia, (3) menerapkan filsafat “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”, (4) menjunjung tinggi semangat saling menghormati, beritikad dan berprasangka baik, (5) pengakuan dan penerapan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak tinggal dimana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Bumi Kalimantan, (6) para pengungsi yang ingin dan akan kembali ke Kalimantan diatur pelaksanaannya dengan seksama dan sebaik-baiknya melalui tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan dan tahap rehabilitasi, sehingga hak pengungsi maupun warga di sekitar tempat kembali itu telah dapat dipersiapkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, institusi sosial serta tokoh-tokoh masyarakat.

- 3) Bahwa hal ini memerlukan kerja keras yang ikhlas dari semua pihak, terutama dalam rangka sosialisasi sampai ke akar rumput (masyarakat lapisan bawah), sehingga tidak terjadi salah informasi dan salah interpretasi yang dapat memberi peluang kepada provokator atau anasir lainnya untuk menciptakan kejadian serupa terulang.

Kesamaan tujuan yang akan dicapai dan diupayakan oleh semua pihak ke seluruh strata, yaitu:

- 1) Menciptakan suasana aman dan damai, menegakkan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan sebagai perwujudan Sumpah Pemuda 1928 untuk mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta mensukseskan program reformasi yang demokratis, anti anarkis dan menghargai kebhinekaan dalam keikaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemulangan pengungsi ke pemukiman semula di tempat sebelum mereka mengungsi, yaitu di Kalimantan diatur sebaik-baiknya melalui proses dan pentahapan seperti dimaksud dalam prinsip dasar, dengan tetap menghargai keinginan lain yang muncul. Perlindungan hak-hak sipil bagi para pengungsi seperti atas aset yang mereka miliki.
- 3) Pemerintah Pusat dan Daerah akan terus menerus melakukan fasilitasi terhadap permasalahan pengungsi dan upaya-upaya kerukunan / rekonsiliasi.
- 4) Jaminan keamanan umum oleh negara dengan dukungan aparaturnya keamanan serta aparat penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat. Menciptakan rasa aman dan saling pengertian serta rasa kebersamaan. Ditegakkannya supremasi hukum berdasarkan keadilan, sehingga tercapai rasa keadilan masyarakat.
- 5) Penghormatan pada Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia tidak hanya berpotensi untuk dilanggar oleh aparaturnya negara, tetapi juga bisa dilanggar oleh warga masyarakat yang lain (rakyat biasa) sehingga setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia harus bisa dicegah dan ditindak secara adil dan bertanggung jawab.
- 6) Peningkatan kesejahteraan rakyat seluruhnya dan menghilangkan kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan, berdasarkan rasa keadilan sosial dan berwatak mulia, mengatasi kemiskinan dan pemerataan pendidikan guna meningkatkan peradaban yang lebih maju, melalui program-program yang didukung dana pemerintah maupun swasta.

Kesamaan cara bertindak yang berhubungan dengan sosialisasi dan operasionalisasi dari hasil-hasil musyawarah, secara simultan dan sungguh-sungguh, sehingga tercapai:

- 1) Penghentian konflik dan menjaga agar konflik tidak terulang lagi.
- 2) Perwujudan rekonsiliasi di semua strata sosial masyarakat.
- 3) Langkah-langkah nyata dan komprehensif dalam menangani masalah pengungsi untuk merumuskan prinsip-prinsip yang akan digunakan dan titik temu yang ideal dan komprehensif.
- 4) Pelembagaan suatu wadah / forum yang terdiri dari golongan etnis, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk meredam dan menyelesaikan konflik antar etnis, antar agama dalam kegiatan keagamaan seperti mesjid, gereja, pura, kelenteng, vihara dan lain-lain.
- 5) Menghilangkan kecemburuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dengan cara memberdayakan dan memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya.
- 6) Upaya-upaya rehabilitasi yang meliputi mental, sosial ekonomi dan fisik.
- 7) Seluruh upaya yang direncanakan untuk pelaksanaannya mensyaratkan sosialisasi dan bekal-bekal cerdas bagi pihak-pihak, khususnya masyarakat akar rumput.
- 8) Meningkatkan secara terus menerus kewaspadaan semua warga bangsa untuk senantiasa mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, demi keutuhan bangsa.
- 9) Proses ini melibatkan seluruh pihak-pihak masyarakat, tokoh adat, agama dan aparat. Pemerintah harus lebih proaktif dalam menginisiasi dan pelaksanaan sesuai dengan tahapan penyelesaian.
- 10) Pemerintah Daerah agar mendorong Kongres Masyarakat Dayak Kalimantan secepatnya dan perlu segera dipersiapkan sebagai bagian dari proses penyelesaian secara sistematis termasuk Musyawarah Kerja sebagai tindak lanjutnya yang perlu dilakukan dalam waktu singkat.
- 11) Meningkatkan atensi dalam pengembangan wilayah pedalaman.
- 12) Faktor pendukung lain ialah dapat dikembangkannya institusi-institusi pendukung yang harus segera disiapkan pembentukannya seperti Tim Ad Hoc, lembaga adat, pusat kajian lintas etnis, dan lain-lain.

- 13) Butir-butir cara tindak tersebut kiranya dapat ditindak lanjuti secara konsisten dan dalam suatu kerangka kerja dan rentang waktu yang relevan dengan perkembangan permasalahan.

Terhadap berbagai keputusan yang diambil dalam Musyawarah Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan (MDAB-BK) di Jakarta tersebut semakin diperkuat penerimaannya dalam Kongres Rakyat Kalimantan Tengah Tahun 2001, yang diadakan di Palangka Raya pada tanggal 4-7 Juni 2001. Hal itu seperti termaktub dalam ayat 1, dari Pernyataan Sikap yang diambil yaitu:

“Menerima sepenuhnya *Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan hasil Musyawarah Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan* di Jakarta 20-22 Maret 2001 sebagai wujud nyata mediasi Pemerintah Pusat dalam Konflik Antar Etnik di Kalteng dan selanjutnya menyetujui sepenuhnya *Pemerintah Pusat sebagai mediator*. Karena itu kesepakatan ini akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat oleh perutusan Pemerintah dan DPRD Propinsi Kalteng serta perwakilan KRKT [Kongres Rakyat Kalimantan Tengah] 2001 untuk dipertimbangkan, ditindaklanjuti dan ditawarkan kepada pihak warga masyarakat Madura eks-Kalteng melalui Pemerintah Propinsi Jawa Timur”.

Selain soal penyelesaian konflik, dalam Kongres Rakyat tersebut juga dicetuskan pernyataan sikap yang berorientasi kepada penguatan rasa dan kesadaran etnisitas masyarakat Dayak. Dengan kata lain terdapat proses (re)konstruksi etnisitas yang diakibatkan oleh terjadinya konflik. Hal itu seperti tercantum dalam pernyataan sikap nomor 8 sebagai berikut:

“Bahwa hikmah yang dapat diperoleh dari Konflik Antar Etnik ialah: 1) harkat dan martabat serta jatidiri masyarakat Dayak telah diselamatkan dan terangkat dalam tatanan masyarakat majemuk / multi etnik, 2) dengan demikian rasa persatuan, kesatuan dan kerukunan serta kesetiakawanan kian meningkat bukan hanya di kalangan masyarakat Dayak sendiri, tetapi juga antara masyarakat Dayak dan warga masyarakat etnik-etnik lain di Kalteng, 3) kesadaran akan hukum dan adat yang kian meningkat, 4) keyakinan kepada kehandalan “budaya betang” [budaya rumah panjang] dalam memberikan rasa aman dan sejahtera kepada semua pihak, 5) kesadaran akan mendesaknya pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah pedesaan, dan 6) kesadaran akan pelestarian SDA [Sumber Daya Alam] dan pengembangan SDM [Sumber Daya Manusia] dan 7) kesetiaan yang tetap kukuh pada “utus” dalam bingkai NKRI [Negara Kesatuan Republik Indonesia] dengan semangat patriotisme yang tinggi.

Proses (re)konstruksi itu juga sangat mewarnai Musyawarah Besar Damang / Kepala Adat se-Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, tanggal 23-24 Mei 2002. Dalam musyawarah tersebut diambil berbagai keputusan, Sikap / Kesepakatan Mubes yang betul-betul sudah menyentuh “filsafat” kehidupan masyarakat Dayak secara lebih luas dan utuh, antara lain: (1) untuk mendukung kehidupan mereka yang dekat dengan alam, Mubes mendeklarasikan Kalimantan Tengah Sebagai Daerah Ekologi, 2) menyarankan kepada DPRD dan Pemerintah Propinsi / Kabupaten dan Kota agar membuat Perda (Peraturan Daerah) tentang Kalimantan Tengah Sebagai Daerah Ekologi, 3) membentuk Badan Pekerja Musyawarah Besar Damang Kepala Adat Kalimantan Tengah (BP-MBDKA-KT) dan Badan Pengembangan Adat Dayak yang di tingkat Propinsi Kalimantan Tengah, disingkat Bakor-litbang Adat, 4) merevisi Peraturan Daerah No.14 Tahun 1998 Tentang Kedamaian, 5) menyepakati untuk membina dan mengembangkan Sistem Nilai Adat “Budaya Betang” sebagai sumber pembinaan dan pengembangan adat serta hukum adat dalam proses perkembangan masyarakat multi-etnik, multi-agama, masyarakat madani [*civil society*], 6) sepakat untuk menganugerahkan gelar kehormatan adat kepada pejabat-pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli pada pelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah, dan lain sebagainya.

Penutup

Konflik dengan bentuknya yang beragam memang selalu berakibat adanya korban dan pengorbanan. Oleh karena itu juga seringkali menjadi titik tolak me(re)konstruksi kesadaran betapa pentingnya kehidupan yang damai dan tenteram. Tragedi Sampit 2001 yang kemudian meluas ke beberapa daerah di Kalimantan Tengah, juga ke Palangka Raya, telah menjadi pendorong dan motivator bagi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah untuk kembali menata kehidupan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik mereka dalam konteks lokal dan nasional. Bagi mereka, penataan itu merupakan dinamika proses yang berlanjut terus-menerus sejak Rapat Damai Tumbang Anoi 1894¹⁶ (pertemuan pertama seluruh kelompok warga sukubangsa Dayak dengan tujuan (re)konstruksi adat dan tradisi masyarakat Dayak) untuk menjaga, memelihara serta memperkuat jatidiri dan identitas Dayak.

¹⁶ Pertemuan Tumbang Anoi (1894) diprakarsai oleh Damang Batu, Kepala Adat di Tumbang Anoi, dan difasilitasi oleh pemerintah Belanda. Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh kepala adat se Kalimantan Tengah dan beberapa utusan dari luar Kalimantan Tengah. Dihadiri sekitar 1000 orang dan berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Informasi lengkap, lihat KMA M. Usop (1993/1994) dan KMA M. Usop (1996).

Pada konteks Tumbang Anoi (1894) proses (re)konstruksi dilakukan sebagai akibat perang antar kelompok-kelompok (sub-etnis) Dayak. Pada konteks Tragedi Sampit 2001 yang kemudian berimbas ke Palangka Raya proses (re)konstruksi masyarakat Dayak disebabkan konflik antara kelompok-kelompok (sub-etnis) Dayak dengan warga sukubangsa Madura. Menurut Eriksen (1993) (re)konstruksi suatu kelompok etnis atau kelompok identitas dapat bangkit kembali ketika kelompok tersebut berada dibawah ancaman. Proses itu dilakukan sebagai usaha untuk mempertahankan eksistensi kelompok dan kebudayaannya.

Daftar Pustaka

- Bullock, Alan, et.al. (1989) *The Fontana Dictionaty of Modern Thought*, Second edition, Fontana Press.
- Eriksen T. Hylland. (1993) *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives*, London and Boulder, Colorado: Pluto Press.
- Grenz, Stanley J. (2001). *A Primer on Post Modernism*, Yogyakarta, diterjemahkan dan diterbitkan oleh ANDI.
- Langkah-langkah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Palangka Raya Terhadap Kejadian di Kota Palangka Raya*, (Laporan), Walikota Palangka Raya, 2001.
- Laporan Perkembangan Terakhir Pasca Kerusuhan di Kota Palangka Raya*, (Periode s/d 31 Maret 2001), Walikota Palangka Raya.
- Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Ngaju di Propinsi Kalimantan Tengah*, Biro Pemerintahan Desa, Setwilda Tingkat I Kaluimantan Tengah, (TT).
- Usop, KMA M. (1993/1994) *Rapat Damai Tumbang Anoi*, Proyek Bantuan Pembinaan Kebudayaan dan Pelestarian Peninggalan Sejarah / Kepurbakalaan.
- Usop, KMA M. (1996) *Pakat Dayak: Sejarah Integrasi dan Jati Diri Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah*, Palangkaraya, Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang Garing (YPK-BG).

Dokumen

- (1) Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan (Penanganan Tujuh Akar Masalah Secara “Konsepsional, Komprehensif, Integral” atau Terpadu dengan Proses Pembangunan Daerah dan Nasional), Musyawarah Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan (MDAB-BK), Nam Centre, Jakarta, 22-24 Maret 2002.
- (2) Surat Keputusan Musyawarah Besar Pertama Damang Kepala Adat se Kalimantan Tengah No.01/MB-DKA-KT/024/2002 tentang Pernyataan Sikap Musyawarah Besar Pertama Damang Kepala Adat se Kalimantan Tengah sebagai Daerah Lingkungan Hidup (Kalteng sebagai Daerah Ekologi), Palangka Raya 23-24 Mei 2002.

Surat Kabar:

- (1) *Kalteng Pos*, 7 Juni 2002.
- (2) *Kalteng Pos*, 10 Juni 2002.
- (3) *Posko Kalteng*, 10 Juni 2002.
- (4) *Radar Banjar*, 11 Juni 2002.
- (5) *Republika*, 19 Maret 2001.